



SUMBER BERITA

RABU, 11 APRIL 2018

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Inspektorat Berwenang

Investigasi Dugaan Korupsi

BENTENG, BE - Ini perhatian serius bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) maupun anggaran pusat.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan dari 3 (tiga) kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Inspektorat Daerah (Ipda) mendapatkan delegasi untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Berdasarkan perjanjian kerjasama (PKS) 3 kementerian, Inspektorat Daerah diperkenankan untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap laporan dugaan korupsi. Hanya saja, investigasi hanya akan dilakukan pada laporan dugaan korupsi yang besarnya di bawah Rp 200 juta," ungkap Kepala Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Benteng, Hasan Basri SSos.

Pria yang pernah menjabat Asisten III Setda Pemkab Benteng ini menuturkan, investigasi merupakan

salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersama aparat penegak hukum (APH) untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang besar.

Akan tetapi, jika nantinya dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana korupsi tak bisa mengembalikan uang tersebut, Hasan Basri menegaskan bahwa pihaknya akan langsung melimpahkan perkara tersebut ke APH untuk diproses.

"Melalui pemeriksaan, diharapkan kerugian negara yang jumlahnya tidak terlalu besar bisa dikembalikan ke kas negara," tandasnya.

Masih kata Hasan Basri, pendelegasian investigasi terhadap Ipda Kabupaten Benteng belum sepenuhnya bisa diterapkan. Melainkan, masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.

"Rencana awal, launching pendelegasian investigasi terhadap laporan dugaan korupsi dilakukan pada tanggal 9 April 2018 lalu di Provinsi Bengkulu. Karena terjadi penundaan, jadwal launching belum ditentukan dan masih menunggu instruksi. Setelah ada pendelegasian, Ipda Benteng siap beraksi," pungkasnya. (135)